

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO")
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) I
ARKORA HYDRO TAHUN 2023**

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I Arkora Hydro Tahun 2023 ("Obligasi") berdasarkan Akta Nomor 58 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I Arkora Hydro Tahun 2023, dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 20 Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Arkora Hydro Tbk, dengan ini mengundang kepada para pemegang Obligasi untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 06 Oktober 2026
Waktu : Pukul 10.30 WIB – selesai
Tempat : Kantor Pusat PT Arkora Hydro Tbk, Treasury Tower, Level 9 Unit G-H
District 8 SCBD Lot. 28, Jln. Jend Sudirman Kav 52 – 53 Jakarta 12190

Agenda RUPO:

- Persetujuan atas penggantian Wali Amanat dan Pengangkatan Wali Amanat Baru Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I Arkora Hydro Tahun 2023 dan
- Persetujuan atas rencana perubahan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan yang terkait dengan penggantian Wali Amanat dan Pengangkatan Wali Amanat baru.

Catatan:

1. RUPO ini dilaksanakan atas permintaan PT Arkora Hydro Tbk selaku Emiten.
 2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
 3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).
 4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
 - a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
 - d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir, serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili,
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
 6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.
- Sebelum dilaksanakannya RUPO (pada saat registrasi sebelum RUPO dimulai), Pemegang Obligasi atau kuasanya yang hadir dalam RUPO wajib membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten.

Jakarta, 22 September 2026

EMITEN

ARKORA HYDRO
PT ARKORA HYDRO TBK

WALI AMANAT

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

INDUSTRI & PERDAGANGAN

Tiga Invensi Curi Perhatian Industri

NERACA

Surabaya - Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI mempertemukan 13 inventor dan pelaku industri dalam kegiatan Patent Pitching Day Surabaya 2026 di Universitas Airlangga, Surabaya. Sebanyak tujuh invensi hasil riset perguruan tinggi dipresentasikan kepada mitra industri untuk membuka peluang hilirisasi, lisensi, dan kerja sama komersial.

Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang menegaskan bahwa perlindungan paten tidak boleh berhenti pada penerbitan sertifikat. Ia menjelaskan bahwa masih banyak hasil riset perguruan tinggi yang telah memperoleh perlindungan paten, tetapi belum terhubung dengan kebutuhan pasar. Karena itu, DJKI berupaya menjadi penghubung yang mempertemukan inventor dengan dunia usaha agar teknologi yang dikembangkan dapat menjawab kebutuhan industri sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi.

“Paten bukanlah garis akhir dari proses inovasi. Paten adalah salah satu titik penting dalam perjalanan yang lebih panjang, yaitu perjalanan dari pengetahuan menuju teknologi, dari teknologi menuju produk, dan dari produk menuju manfaat ekonomi dan sosial,” ujarnya saat membuka kegiatan

tersebut. Dalam kegiatan ini, tujuh invensi yang dipitching meliputi sepeda listrik hybrid dengan sistem pemantauan kesehatan pengendara, sistem manajemen distribusi dan logistik terintegrasi berbasis teknologi digital, tablet effervescent berbasis porang sebagai agen anti-kolesterol, pak baterai kendaraan listrik dengan sistem dual-port, proses produksi bovin hidroksiapatit dari femur tulang sapi, kit deteksi cepat tetrasiklin untuk karkas ayam, serta Excelzyme.

Dari seluruh invensi yang dipresentasikan, tiga teknologi berhasil menarik perhatian mitra industri, yakni Sepeda Listrik Sistem Hybrid Dilengkapi Pengukur Detak Jantung dan Oximeter dari Universitas Negeri Surabaya, Sistem Manajemen Distribusi dan Logistik Terintegrasi dari Universitas Ciputra, serta Pak Baterai dengan Dual Fungsi Pengisian Daya dari Universitas Airlangga.

Ketiga invensi tersebut memperoleh ketertarikan dari perusahaan produksi sepeda untuk dijajaki lebih lanjut sebagai potensi kerja sama pengembangan teknologi. Hasil ini menunjukkan adanya peluang nyata bagi hasil riset perguruan tinggi untuk memasuki tahap hilirisasi dan pemanfaatan oleh industri.

Di sisi lain, Prof. Nurul Barizah mewakili para inventor dari Universitas Airlangga sangat mengapresiasi dan berharap forum ini menjadi awal lahirnya kolaborasi konkret antara inventor dan dunia usaha. Menurutnya, upaya seperti ini harus terus dilakukan agar ada keterkaitan antara semua pihak untuk mema-

jukan ekosistem paten. “Ini acara yang sudah kita tunggu-tunggu. Kami berharap agenda seperti ini tidak hanya sekali, atau bahkan harusnya bisa dilakukan secara reguler karena ketika kita bertemu mitra bisnis, itu menunjukkan bahwa kampus itu bukan sekedar menara gading yang cuma sekedar keren tapi juga harus membumi,” ucap Nurul. DJKI juga terus mendorong para inventor untuk melindungi invensinya melalui sistem paten sekaligus aktif membangun kemitraan dengan industri agar hasil riset dapat berkembang menjadi produk yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang paten, masyarakat dapat mengakses laman dgip.go.id.

Lebih lanjut, Indonesia saat ini menguasai sekitar 25 persen pangsa paten di kawasan ASEAN. Namun, kontribusi ekonomi dari pemanfaatan paten tersebut masih sangat kecil, hanya sekitar 0,08 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan Indonesia saat ini bukan lagi menghasilkan invensi, melainkan memastikan hasil riset dan paten dapat terhubung dengan industri, investasi, dan pasar sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah terus memperkuat ekosistem kekayaan intelektual agar paten tidak berhenti sebagai dokumen perlindungan hukum, melainkan menjadi aset ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan nasional.

“Indonesia menguasai sekitar 25 persen share paten di ASEAN, tetapi monetisasinya baru sekitar 0,08 persen. Karenaitukitaharus memastikan bahwa paten tidak berhenti di sertifikat,” ujar Supratman. ●gro



10 TAHUN INOVASI LG INSTAVIEW : Head of Product Marketing Kitchen Home Appliance Solution LG Electronics Indonesia Rumbi Lahari Simanjuntak (kiri) dan Product Director Kitchen Home Appliance Solution LG Electronics Indonesia Jungsoo An (kanan) foto bersama di depan produk kulkas LG InstaView usai memberikan keterangan terkait Selebrasi 10 Tahun Inovasi LG InstaView di Jakarta, Jumat (18/9). LG Electronics Indonesia menghadirkan program apresiasi bagi pengguna kulkas LG InstaView di Indonesia dalam rangka memperingati satu dekade pemasaran produk tersebut secara global.

Perkuat dan Kembangkan IKM Batik Agar Berdaya Saing

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat upaya pelestarian sekaligus pengembangan industri batik nasional agar semakin berdaya saing. Salah satunya dilakukan melalui kolaborasi dengan Yayasan Batik Indonesia (YBI) dalam penyelenggaraan rangkaian Hari Batik Nasional (HBN) 2026.

■ NERACA

Momentum peringatan Hari Batik Nasional diharapkan tidak hanya meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya bangsa, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi industri kecil dan menengah (IKM) batik untuk berkembang dan memperluas pasar.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, industri batik memiliki peran penting dalam struktur industri nasional karena tidak hanya mengandung nilai budaya yang tinggi, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi dan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan industri batik perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas, inovasi, kapasitas produksi, serta perluasan akses pasar.

“Batik tidak hanya merupakan warisan budaya, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang perlu terus

dikembangkan. Pemerintah berkomitmen memacu IKM batik agar mampu meningkatkan kualitas, melakukan inovasi, memperluas akses pasar, dan semakin kompetitif di pasar nasional maupun global,” ujar Agus di Jakarta.

Selain memiliki basis industri yang tersebar di berbagai daerah, produk batik Indonesia juga telah mampu menembus pasar ekspor. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, nilai ekspor produk batik pada tahun 2025 mencapai USD-20,14 juta atau meningkat 32,50 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar USD15,20 juta.

Sementara itu, nilai ekspor komoditas batik pada triwulan II tahun 2026 tercatat sebesar USD4,39 juta, mengalami kontraksi sebesar 13,76 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencapai USD5,09 juta.

Kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya upaya berkelanjutan untuk memperluas pangsa pasar

batik Indonesia di tingkat global. Agus menegaskan, penguatan industri batik perlu dilakukan melalui sinergi berbagai pihak dengan mencakup aspek pelestarian kekayaan budaya, peningkatan kapasitas IKM, inovasi produk, hingga perluasan akses pasar. Penyelenggaraan Hari Batik Nasional menjadi salah satu momentum strategis untuk memperkenalkan kekayaan batik dari berbagai daerah kepada masyarakat sekaligus pasar nasional dan internasional.

“Penyelenggaraan Hari Batik Nasional menjadi momentum penting untuk mengeksplorasi lebih jauh kekayaan batik yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah agar semakin dikenal oleh pasar. Hal ini sekaligus memerlukan apresiasi masyarakat terhadap keberagaman motif, filosofi, dan kreativitas batik Indonesia,” kata Agus.

Pengembangan IKM Batik

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menyampaikan, pengembangan IKM batik perlu ditopang dengan peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, inovasi, serta akses terhadap pasar yang lebih luas. Terlebih, penggunaan batik kini terus berkembang dan tidak lagi terbatas sebagai busana

adat maupun pakaian formal, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari masyarakat, termasuk kalangan profesional dan generasi muda. “IKM batik memiliki kekuatan pada kekayaan motif, keterampilan perajin, dan karakter khas dari masing-masing daerah. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, kami menekankan pentingnya IKM untuk mengembangkan produk yang tetap mempertahankan identitas budaya, namun mampu mengikuti kebutuhan dan tren pasar,” ujar Reni.

Reni menjelaskan, Kemenperin terus menumbuhkan dan mengembangkan IKM batik melalui berbagai program strategis, antara lain fasilitasi sertifikasi dan pengusulan perlindungan indikasi geografis, pembangunan dan revitalisasi sentra IKM, pengembangan sumber daya manusia industri, program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan, penumbuhan wirusaha baru, serta fasilitasi promosi dan pameran secara berkelanjutan.

Selain itu, Kemenperin memberikan dukungan melalui fasilitasi sertifikasi produk, seperti Batikmark, Sertifikat Industri Hijau, dan Sertifikat Halal. Transformasi teknologi juga terus dipacu melalui penerapan Industri 4.0 pada industri

batik, termasuk penguanaan *Enterprise Resource Planning* (ERP).

“Kami pun aktif memfasilitasi dan mendampingi pengusulan perlindungan Indikasi Geografis batik. Ada tiga yang telah difasilitasi dan terdaftar di Kementerian Hukum, yaitu Batik Tulis Nitik Yogyakarta, Batik Tulis Complongan Indramayu, dan Batik Tulis Tenun Gedhog Tuban,” jelas Reni.

Pengembangan industri batik juga diarahkan pada aspek keberlanjutan dan regenerasi perajin. Kemenperin telah melaksanakan berbagai program pengembangan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, pendampingan, seminar, dan *talkshow*. Selain itu, dilakukan penyusunan buku mengenai batik ramah lingkungan dan batik berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mentransformasi industri batik agar semakin adaptif terhadap tuntutan keberlanjutan dan perkembangan teknologi.

“Kami menyadari bahwa seluruh upaya ini tidak akan buahkan hasil optimal tanpa adanya kolaborasi yang erat antarpemangku kepentingan. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat pecinta batik jadi kunci mewujudkan industri batik nasional,” ungkap Reni. ●gro

PENGUMUMAN
Untuk memenuhi ketentuan UUP T No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT ANUGRAH EKSPEDISI MAKMUR, berdasarkan Keputusan Direksi, memutuskan penggantian nama PT ANUGRAH EKSPEDISI MAKMUR menjadi PT ANUGRAH EKSPEDISI MAKMUR BERKEDUKAN DI JAKARTA BARAT, tanggal 03 September 2026 telah dilakukan Pengambilan Keputusan sebagai dasar saham-saham di dalam Perseroan ("Pengambilan Saham").
Bagi para kreditor yang ingin mengajukan keberatan dapat menyampaikan secara tertulis ke alamat Perseroan.
PT ANUGRAH EKSPEDISI MAKMUR, Direksi
Jakarta, 22 September 2026

PT ASIA SUKSES MOTOR UNDANGAN RUPS LUAR BIASA
Dengan Hormat,
Kami mengundang Bapak/Ibu Para Pemegang Saham PT Asia Sukses Motor (Perseroan) untuk dapat hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/LB) Perseroan yang akan diadakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 07 Oktober 2026
Waktu : 10:00 WIB s.d Selesai
Tempat : Lounge Room 2, Wisma Asia 1 Lt 12, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 79, Jakarta Barat, 11420
Agenda : 1. Perubahan Susunan Direksi.
Materi RUPS Luar Biasa dapat diperoleh oleh Bapak/Ibu Para Pemegang Saham di Kantor Perseroan.
Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan keahliannya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 22 September 2026
PT Asia Sukses Motor

PENGUMUMAN PEMBARUAN/LIKUIDASI
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PERTANI PROPERTI, tanggal 18 September 2026 Nomor: 09, dibuat oleh DESI, S.H., M.KN, Notaris di Kota Jakarta Timur, Seluruh Pemegang Saham setuju untuk MEMBARUAN PT. PERTANI PROPERTI, berkedudukan di Jakarta Selatan, terhitung sejak tanggal 18 September 2026, dengan menutuli ADHITYA PRA PRATAMA, ARIF MUGHJARJO, YURIS SATRIA HERLAMANG, ISMA REZA INDARTO, SE, sebagai Tim Likuidator. Selain itu, berdasarkan dari para Kreditor/pihak yang berkepentingan sehubungan dengan Pembubaran/Likuidasi Perseroan, dapat diajukan secara TERTULIS kepada Tim Likuidator yang beralamat di Gedung Cahaya, Jalan Pasar Minggu Petan No. 1, Jakarta Selatan 12760 dalam jangka waktu 60 hari terhitung dari pengumuman ini dibuat, dengan bukti-bukti dan alasan-alasan yang sah serta ditandatangani kepada:
TIM LIKUIDATOR
PT. PERTANI PROPERTI
Jakarta, 22 September 2026
Tim Likuidator

PENGUMUMAN
Dengan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM PENGANTAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS "PT. SENTRA NIAGA GLOBAL" Nomor: 310, tanggal 21 September 2026, yang dibuat oleh EKA ASTRI MAERISA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Di Kabupaten Bogor, telah diputuskan untuk membarukan (melikwidir) "PT. SENTRA NIAGA GLOBAL" berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dan menunjuk Tuan KARDIAN, selaku Likwidator Perseroan, segala keberatan dan sanggahan dapat diajukan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7, Jakarta Selatan.
Jakarta, 22 September 2026
Direksi Perseroan
PT.SENTRA NIAGA GLOBAL

PENGUMUMAN
Berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham PT WINNER INTEGRASI NUSANTARA, berkedudukan di Jakarta Barat ("PT") yang berlaku efektif tanggal 27 Agustus 2026, beralamat di APJ Tower, Central Park, Lantai 19, Unit T7, Jalan Letjen S. Parman, Kavling 28, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta, telah menyetujui pembubaran PT dan mengangkat Nyonya CALISTA DATUNSOLANG, THONG selaku Likuidator PT.
Kepada para kreditor dan debitor PT untuk menyelesaikan tagihan dan/atau hutang PT paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini ke alamat PT di atas.
Likuidator tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak disampaikan kepada PT dan akan dianggap selesai.
Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 22 September 2026
ttd
CALISTA DATUNSOLANG, THONG (Likuidator PT)

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO") OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN ("GREEN BOND") I ARKORA HYDRO TAHUN 2023
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat Obligasi Berwawasan Lingkungan ("Green Bond") I Arkora Hydro Tahun 2023 ("Obligasi") berdasarkan Akta Nomor 58 Perjanjian Perwalianamanat Obligasi Berwawasan Lingkungan ("Green Bond") I Arkora Hydro Tahun 2023, dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 20 Addendum III Perjanjian Perwalianamanat Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Arkora Hydro Tbk, dengan ini mengundang kepada para pemegang Obligasi untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 06 Oktober 2026
Waktu : Pukul 10.30 WIB – selesai
Tempat : Kantor Pusat PT Arkora Hydro Tbk, Treasury Tower, Level 9 Unit G-H District 8 SCBD Lot. 28, Jln. Jend Sudirman Kav 52 – 53 Jakarta 12190
Agenda RUPO:
- Persetujuan atas penggantian Wali Amanat dan Pengangkatan Wali Amanat Baru Obligasi Berwawasan Lingkungan ("Green Bond") I Arkora Hydro Tahun 2023 dan
- Persetujuan atas rencana perubahan ketentuan Perjanjian Perwalianamanat yang terkait dengan penggantian Wali Amanat dan Pengangkatan Wali Amanat baru.
Catatan:
1. RUPO ini dilaksanakan atas permintaan PT Arkora Hydro Tbk selaku Emiten.
2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari Jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).
4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir, serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
- Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.
- Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
- Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.
Sebelum dilaksanakannya RUPO (pada saat registrasi sebelum RUPO dimulai), Pemegang Obligasi atau kuasanya yang hadir dalam RUPO wajib membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten.
Jakarta, 22 September 2026
EMITEN
ARKORA HYDRO
PT ARKORA HYDRO TBK
WALI AMANAT
BNI
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN REKSA DANA MANDIRI INVESTA EKUITAS SYARIAH
PT Mandiri Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi REKSA DANA MANDIRI INVESTA EKUITAS SYARIAH ("Manajer Investasi") dengan ini mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA MANDIRI INVESTA EKUITAS SYARIAH (selanjutnya disebut "MANDIRI INVESTA EKUITAS SYARIAH").
Pembubaran MANDIRI INVESTA EKUITAS SYARIAH dilakukan sehubungan dengan terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif j/s. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang menyatakan bahwa MANDIRI INVESTA EKUITAS SYARIAH wajib dibubarkan apabila dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, MANDIRI INVESTA EKUITAS SYARIAH memiliki total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), yang dimulai sejak tanggal 17 Maret 2026 sampai dengan tanggal 21 September 2026.
Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pada tanggal yang sama dengan pengumuman ini, Manajer Investasi telah menyampaikan rencana pembubaran MANDIRI INVESTA EKUITAS SYARIAH kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA EKUITAS SYARIAH terhitung sejak tanggal 22 September 2026.
2. Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan ditandatanganinya akta pembubaran MANDIRI INVESTA EKUITAS SYARIAH yang dibuat di hadapan notaris.
Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.
Jakarta, 22 September 2026
Manajer Investasi
REKSA DANA MANDIRI INVESTA EKUITAS SYARIAH
PT Mandiri Manajemen Investasi
Menara Mandiri II, lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190 – Indonesia
Telephone : (021) 526 3505
Website: www.mandiri-investasi.co.id
Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pasokan Beras Aman, Bulog Diminta Perkuat Pasokan Premium

NERACA

Jakarta - Pasokan beras dipastikan tetap aman di tengah penarikan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi ketentuan mutu dan kandungan sesuai label. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan langkah pengawasan dan penertiban tersebut berjalan bersama dengan penguatan stok, penyaluran SPHP, serta pemerataan distribusi beras.

Per 18 September 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tercatat sekitar 4,6 juta ton. Sepanjang 2026 hingga pertengahan September, penyaluran CBP telah mencapai sekitar 2,3 juta ton melalui berbagai program intervensi.

Kondisi stok tersebut menjadi penyangga pemerintah dalam menjaga pasokan beras di tengah berbagai tantangan produksi dan distribusi. Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, Bapanas terus memperkuat intervensi melalui program SPHP. Pemerintah juga tengah memproses penambahan kuantum SPHP

beras sebesar 1 juta ton untuk menasdar daerah yang mengalami tekanan harga dan pasokan.

Selain beras medium dan SPHP, pemerintah juga memastikan pasokan beras premium tetap diperkuat agar kebutuhan masyarakat di berbagai segmen pasar dapat terpenuhi. Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman meminta Perum Bulog mengoptimalkan penyaluran stok beras premium yang tersedia, terutama ke jaringan ritel modern.

“Beras premium kami minta Bulog optimalkan men-supply, karena stoknya banyak. Itu ke toko-toko ritel modern, itu segera disupply. Tidak boleh tidak ada kata lain kecuali memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Amran, yang juga Menteri Pertanian.

Penguatan pasokan tersebut berjalan bersamaan dengan pengawasan pemerintah terhadap peredaran beras di pasar. Dari hasil pemeriksaan, pemerintah menemukan dugaan peralihan dari beras premium ke beras fortifikasi yang kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan labo-

ratorium terhadap produk yang beredar. “Ternyata ada dugaan (kecurangan beras) beralih dari premium ke fortifikasi. Katanya fortifikasi, setelah kita cek di lab, ada 4 lab kredibel. Kita cek ternyata tidak sesuai dengan labelnya,” beber Amran.

Temuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penarikan terhadap produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan kandungan dan mutu sesuai SNI 9314:2024 untuk kernel beras fortifikasi dan SNI 9372:2025 untuk beras fortifikasi.

Sebanyak 11 pelaku usaha sebagai pemilik 25 izin edar merek beras fortifikasi yang tidak sesuai tersebut telah mendapatkan surat peringatan dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam koordinasi dengan Bapanas. ●gro